



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024



*Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah*

bappelitbangda.purwakartakab.go.id 

Jl. Gandanegara No. 25 
Purwakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan BAPPELITBANGDA untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 di BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2024.

Kami berharap dokumen Perubahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA


NINA HERLINA

NIP. 19690101 199501 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika.....	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	II-7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda	II-1
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda II-2	
2.4 Review terhadap Perubahan RKPD.....	II-2
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-3
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Bappelitbangda s.d. Triwulan II Tahun 2024 II-1

BAB III

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2024 III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
 23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026;
 24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
 25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Bappelitbangda sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4 Sistematika

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

	2.4	Review Terhadap Perubahan RKPD
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda
	3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA
BAB V		PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2024 - 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, pelaksanaan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta (APBD Parsial Tahun 2024) mencapai sebesar Rp 6.582.471.579 atau 42.49% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 16.406.672.561 Anggaran dan Realisasi Belanja dalam APBD Parsial Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran adalah seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Bappelitbangda s.d. Triwulan II Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	9.015.000	36,06	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.220.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.220.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	18.379.200	73,52	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.220.000	11.927.000	47,71	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.146.845.050	3.790.478.425	45,96
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	7.439.400	49,60
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	4.840.000	19,36
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	148.760.000	137.040.000	91,36
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	115.158.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	149.406.000	99,60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	24.423.000	32,56
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.552.000	127.700.000	49,01
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	23.756.700	23,76
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.518.000	50.029.583	25,01
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.000.000	88.887.000	40,92
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	52.174.240	23,19
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42.160.000		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	156.118.485	59.385.000	37,66
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	135.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		416.280.160	197.420.160	49,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.210.000	1.580.000	31,60
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	19.135.623	25,51
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	17.540.000	23,39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.862.736	148.217.431	33,54
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.000.000	34.874.719	26,83

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284.349.355	84.349.355	29,66
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	150.000.000		
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	102.980.000	100.158.000	85,24
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	80.000.000	74.250.000	92,81
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	260.000.000	242.637.300	93,32
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	75.000.000	70.649.900	94,20
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	618.079.134	176.832.800	33,68
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	157.500.000	74.725.000	96,42
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	51.032.000	92,79
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	151.232.141		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.000.000	14.147.250	31,44
Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.100.000	149.630.000	77,73

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
Perencanaan Pembangunan Daerah		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	15.155.400	30,31
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.400.000	5.775.000	11,55
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	537.500.000	28.435.500	7,34
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.500.000	19.842.100	21,45
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	107.500.000	8.710.000	8,10
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000	4.812.000	4,81
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	125.000.000	8.380.000	6,70
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	227.918.000	181.687.052	79,72
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.500.000	3.234.000	5,17
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	80.000.000	12.430.000	15,54

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	142.082.000	5.731.000	9,23
Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	82.500.000	9.553.950	11,58
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000	3.211.500	3,21
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000	5.073.000	5,07
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100.000.000	4.537.000	4,54
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100.000.000	2.171.000	2,17
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	140.000.000	15.382.350	10,99
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	226.250.000	7.621.710	3,37
JUMLAH			16.406.672.561	6.348.802.828	39

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Dari Tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasional yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, program ini memiliki 2 (dua) tolak ukur yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah dimana target yang ingin dicapai adalah AA dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat Baik.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 6.348.802.828,00 dari target Rp 16.406.672.561,00 (39%), untuk kemajuan fisik sebesar 64,70 %, adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 9.015.000 dari pagu anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 atau 36.06%;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 atau 0 %
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 atau 0 %
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 atau 0 %

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 atau 0 %
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 18.379.200,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 atau 73.52%
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Realisasi Keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar 11.927.000,00 dari pagu Rp 24.220.000,00 atau 47,71%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 3.790.478.425,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 8.146.845.050,00 atau 45.96%;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 atau 0 %;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sbesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 atau 0%.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sun kegiatan yaitu :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 7.439.400,00 dari pagu anggaran sebesar 15.000.000,00 atau 49,60%;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, realisasi ekuangan sampai dengan triwulan II

adalah sebesar Rp 4.840.000,00 dari pagu anggaran sebesar 25.000.000,00 atau 19.36%.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 137.040.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 148.460.000,00 atau 91.36%;
 - 2) Pendataan dan Peolahan Administrasi Kepegawaian, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar 115.185.000,00 atau 0,00;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 atau 0%;
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 149.406.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 atau 99.60%.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 24.423.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 atau 32.56%;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 127.700.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 260.552.000,00 atau 49.01 %;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 23.756.700,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 23.76%

- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 50.029.583,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 237.518.000,00 atau 25.01 %;
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 83.887.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 205.000.000,00 atau 40.92%;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 52.147.240,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 225.000.000,00 atau 23.19%;
 - 7) Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 42.160.000,00 atau 0%;
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 59.385.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 156.118.485 atau 37.66%.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengadaan Mebel, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 135.000.000,00 atau 0,00;
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 atau 0%;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 197.420.160,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 416.280.160,00 atau 49.68%.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 1.580.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 5.210.000,00 atau 31.60%;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 19.135.523,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 atau 25.51%;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 17.540.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 atau 23.39%;
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 148.217.431,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 429.862.736,00 atau 33.54%.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 34.874.719,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 134.000.000,00 atau 26.83%;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 atau 0%;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 84.349.355,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 284.349.355,00 atau 29.66%.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, program ini memiliki 6 (enam) tolak ukur yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA dengan target Ada, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA dengan target Ada, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA dengan target Ada, Persentase Tahapan Perencanaan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dengan target 100%, Tersedianya Dokumen Profil Pembangunan Daerah dengan target Ada dan Capaian Kinerja RKPD dengan target 89%.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 646.848.000,00 dari target Rp 1.286.059.134,00 (%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 61.39 %. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 atau 0%;
 - 2) Pelaksanaan Konsultasi Publik, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 100.158.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 102.980.000,00 atau 85.24%;
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 74.250.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 atau 92.81%;

- 4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 242.637.300,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 260.000.000,00 atau 93.32%;
 - 5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 70.649.900,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 atau 94.20%;
 - 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 176.832.800,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 618.079.134,00 atau 33.68%.
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 74.725.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 157.500.000,00 atau 96.42%;
 - 2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 51.032.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 55.000.000,00 atau 92.79%.
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 0%;

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 14.147.250,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 45.000.000,00 atau 31.44%.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, program ini memiliki 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target 100%, Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan target 100% dan Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target 100%.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 436.103.652 dari target Rp 1.797.500.000 (28.36%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100 %. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 149.630.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 170.100.000,00 atau 77.73%;
 - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 15.155.400,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 atau 30.31%;

- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 5.775.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 22.400.000,00 atau 11.55%;
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 28.435.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 537.500.000,00 atau 7.34%.
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 19.842.100,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 172.500.000,00 atau 21.45%;
 - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 8.710.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 107.500.000,00 atau 8.10%;
 - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 4.812.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 4.81%;
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 8.380.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 125.000.000,00 atau 6.70%.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 181.687.052,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 227.918.000,00 atau 79.72%;
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 3.234.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 62.500.000,00 atau 5.17%;
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 12.430.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 atau 15.54%;
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 5.731.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 142.082.000,00 atau 9.23%.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, program ini memiliki 4 (empat) indikator yaitu Persentase implementasi rencana kelitbangan dengan target 15%, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target 100%, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan target 53,19% dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan target 100%

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 15.941.060 dari target Rp 848.750.000 (5,60%).

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100 %.
adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 9.553.950,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 82.500.000,00 atau 11.58%;
 - 2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 3.211.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 3.21%.
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 5.073.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 5.07%;
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 4.537.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 4.54%.
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan Pembangunan yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 2.171.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 2.17%.
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 15.382.350,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 140.000.000,00 atau 10.99%;
- 2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 7.621.710,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 226.250.000,00 atau 3.37%.

Adapun evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda sampai Triwulan II secara rinci dituangkan dalam table berikut ini :

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (2024) Tahun yang dievaluasi (Parsial)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2024) Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
				12.023.737.786		5.052.997.816	42.03
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA		AA		100
				1.483.605.641		804.432.250	54.22
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (2024) Tahun yang dievaluasi (Parsial)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2024) Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		
	Persentase Tahapan Perencanaan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Persen	100		100		
	Tersedianya Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		
	Capaian Kinerja RKPD	Persen	89		75,03		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi				1.537.500.000		443.822.252	28,87

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (2024) Tahun yang dievaluasi (Parsial)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2024) Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Persentase Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100		100		
	Persentase Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (2024) Tahun yang dievaluasi (Parsial)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2024) Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	Persentase Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		100		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				848.750.000		47.550.510	5,60
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	15		-		
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100		-		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (2024) Tahun yang dievaluasi (Parsial)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2024) Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	53,19		-		
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100		-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta merupakan Unsur Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 249 Tahun 2021 mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c) Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- d) Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Keuangan; dan

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta :

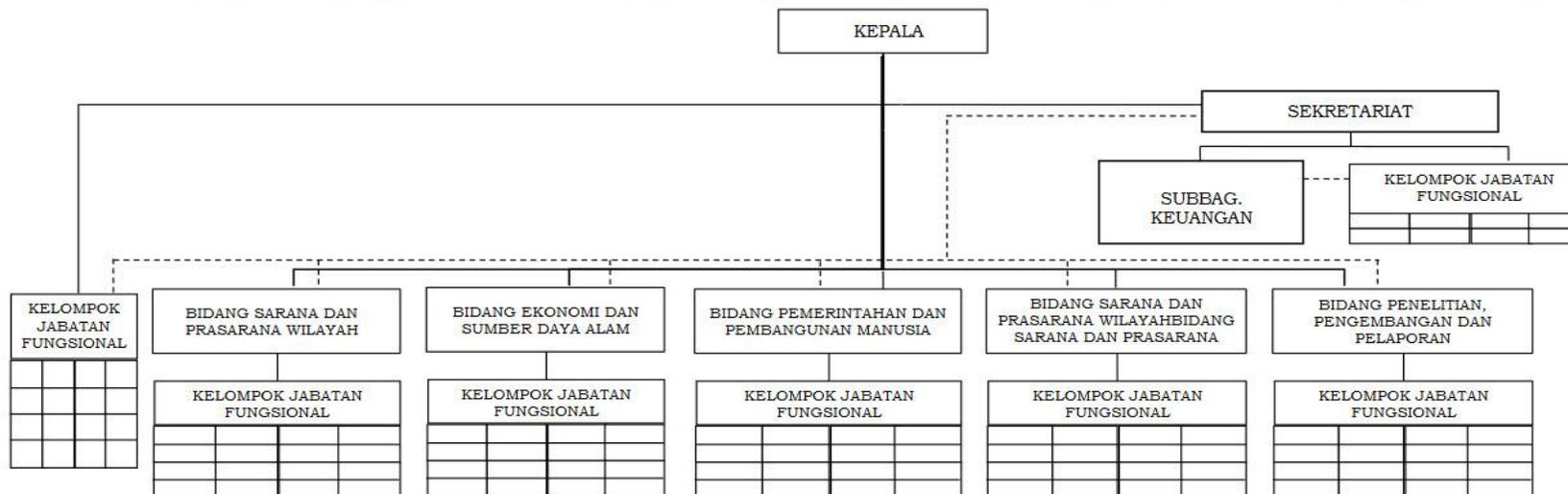
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Berupa Penyediaan dan Penyusunan Dokumen-Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten Purwakarta, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Renaca Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPD 2024-2026 (%)	KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	72,99	73,56	74,11	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,23	9,75	10,24				0,00	0,00	0,00	0,00	10,24
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85	14,63	15,38				0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	7,00	6,30	5,68	7,34			96,37	0,00	0,00	31,79	5,68
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,22	83,58	89,43				0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,01	72,32	72,64				0,00	0,00	0,00	0,00	72,64
7	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,50	1,49	1,48				0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
8	Perubahan Ekonomi	Persen	6,89	6,10	6,39				0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
9	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADRH (Juta)	Rp.	62,77	66,79	69,84				0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
10	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Tid) (%)	Rp.	56,08	58,49	60,91				0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
14	Angka Kemiskinan	Persen	7,25	6,83	6,44	6,41			96,21	0,00	0,00	28,74	6,44
15	Indeks Dinis Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,306	0,280	0,255				0,000	0,000	0,000	0,000	0,255
16	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,64	12,91	13,18				0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
5	Infasi	Persen	1,94	1,29	1,16	-0,35			307,66	0,00	0,00	127,62	1,16
11	Kontribusi sektor pertanian padkebunan terhadap PDRB	Persen	6,39	6,34	6,29				0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik			100,00	0,00	0,00	33,33	Baik
30	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,62	50,68	50,74	48,92			96,64	0,00	0,00	32,21	50,74
128	Capaian SAMIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA	AA	AA			100,00	0,00	0,00	33,33	AA
129	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik			100,00	0,00	0,00	33,33	Baik
130	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	0,00	0,00	33,33	100,00
131	Indeks Inovasi Daerah	Skor/Kategori	50,62	50,68	50,74	48,92			96,64	0,00	0,00	32,21	50,74

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti Pendidikan Lanjutan, Kursus, Pelatihan untuk Meningkatkan Profesionalisme Bidang Perencanaan Sehingga Dapat Menghasilkan Aparatur Perencanaan yang Kreatif dan Inovatif;
2. Terbatasnya SDM pelaksana kegiatan/subkegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
3. Mengembangkan Teknologi Informasi serta Perangkat Keras dan Kelengkapannya Dalam Mendukung Manajemen Pengelolaan Perencanaan yang Lebih Baik Dalam Menunjang Pembangunan;
4. Optimalisasi Perlengkapan dan Peralatan yang Memadai, serta Penambahan Ruang untuk Memenuhi Standard Kelayakan Kerja.

2.4 Review terhadap Perubahan RKPd

Perubahan RKPd Kabupaten Purwakarta dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Perubahan RKPd Tahun 2023 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA (RPO 2024-2026 (%))	KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	72,99	73,58	74,11				0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
2	Baku Mutu Luma Sekolah	Tahun	9,23	9,75	10,24				0,00	0,00	0,00	0,00	10,24
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85	14,63	15,38				0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Person	7,09	6,39	5,68	7,34			46,57	0,00	0,00	0,00	31,79
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Person	62,22	69,58	66,43				0,00	0,00	0,00	0,00	66,43
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,01	72,32	72,64				0,00	0,00	0,00	0,00	72,64
7	Tingkat pertumbuhan penduduk (LPP)	Person	1,51	1,45	1,45				0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
8	Pertumbuhan Ekonomi	Person	5,80	6,10	6,39				0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
9	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADiB (Juta)	Rp.	62,77	66,73	69,54				0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
10	Komposisi Sektor Penjualan dan Indeks Terhadap PDRB (Tajuk)	Rp.	35,00	35,43	35,91				0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
14	Angka Kemiskinan	Person	7,25	6,83	6,44	6,41			86,21	0,00	0,00	0,00	28,74
15	Indeks Gini Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,399	0,399	0,395				0,000	0,000	0,000	0,000	0,395
16	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,64	12,91	13,18				0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
6	Inflasi	Person	1,34	1,25	1,16	-0,35			382,86	0,00	0,00	0,00	127,62
11	Kontribusi sektor pertanian/jadibuwah terhadap PDRB	Person	2,35	2,34	2,33				0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik			100,00	0,00	0,00	0,00	33,33
30	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,62	50,68	50,74	48,92			96,64	0,00	0,00	0,00	32,21
128	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A4	A4	A4	A4			100,00	0,00	0,00	0,00	33,33
129	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik			100,00	0,00	0,00	0,00	33,33
130	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Person	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	33,33
131	Indeks Inovasi Daerah	Skor Kategori	50,62	50,68	50,74	48,92			96,64	0,00	0,00	0,00	32,21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	9.015.000	36,06
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.220.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.220.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	18.379.200	73,52
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.220.000	11.927.000	47,71
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.146.845.050	3.790.478.425	45,96
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	7.439.400	49,60
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	4.840.000	19,36
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	148.760.000	137.040.000	91,36
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	115.158.000		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	149.406.000	99,60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	24.423.000	32,56
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.552.000	127.700.000	49,01
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	23.756.700	23,76
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.518.000	50.029.583	25,01
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.000.000	88.887.000	40,92
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	52.174.240	23,19
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42.160.000		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	156.118.485	59.385.000	37,66
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	135.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		416.280.160	197.420.160	49,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.210.000	1.580.000	31,60
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	19.135.623	25,51
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	17.540.000	23,39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.862.736	148.217.431	33,54
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.000.000	34.874.719	26,83

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284.349.355	84.349.355	29,66
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	150.000.000		
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	102.980.000	100.158.000	85,24
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	80.000.000	74.250.000	92,81
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	260.000.000	242.637.300	93,32
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	75.000.000	70.649.900	94,20
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	618.079.134	176.832.800	33,68
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	157.500.000	74.725.000	96,42
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	51.032.000	92,79
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	151.232.141		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.000.000	14.147.250	31,44
Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.100.000	149.630.000	77,73

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
Perencanaan Pembangunan Daerah		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	15.155.400	30,31
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.400.000	5.775.000	11,55
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	537.500.000	28.435.500	7,34
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.500.000	19.842.100	21,45
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	107.500.000	8.710.000	8,10
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000	4.812.000	4,81
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	125.000.000	8.380.000	6,70
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	227.918.000	181.687.052	79,72
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.500.000	3.234.000	5,17
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	80.000.000	12.430.000	15,54

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI (%)
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	142.082.000	5.731.000	9,23
Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	82.500.000	9.553.950	11,58
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000	3.211.500	3,21
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000	5.073.000	5,07
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100.000.000	4.537.000	4,54
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100.000.000	2.171.000	2,17
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	140.000.000	15.382.350	10,99
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	226.250.000	7.621.710	3,37
JUMLAH			16.406.672.561	6.348.802.828	39

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Maka setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada triwulan ke III dan Triwulan ke IV, selain itu berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama sisa waktu Tahun 2024. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Purwakarta, 21 Agustus 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA



NINA HERLINA

NIP. 19690101 199501 2 003